

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keanekaragaman etnik dan budaya. Keanekaragaman etnik tersebut menyebabkan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke masa cukup menarik untuk dipelajari. Salah satu dari keanekaragaman etnik di Indonesia yaitu adanya etnis Tionghoa, etnis yang dilabelkan sebagai golongan minoritas oleh masyarakat Indonesia pada umumnya karena stereotip yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Etnis Tionghoa merupakan etnis yang berasal dari negeri Tiongkok yang kemudian berdiaspora ke beberapa wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Diaspora etnis Tionghoa (*Chinese Diaspora*) terbesar terjadi pada tahun 1800-an. Gelombang migrasi etnis Tionghoa dari daratan Tiongkok keseluruh penjuru dunia pada saat itu hanya terdapat tiga kelompok, antara lain kelompok pedagang, kelompok misi pemerintah, dan kelompok petualang. Etnis Tionghoa tumbuh dan berkembang di kawasan Asia Tenggara sebagai masyarakat imigran yang memiliki jiwa transnasionalisme, artinya meskipun mereka berada jauh di luar daratan Tiongkok namun tetap memiliki koneksitas yang kuat dengan negeri Tiongkok. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya pengiriman kapital dan pelestarian budaya nenek moyang di tempat mereka berada, serta ikatan solidaritas yang kuat sesama etnis Tionghoa imigran dengan membentuk suatu organisasi atau perkumpulan (Anwar, 2012).

Dewasa ini kita dapat melihat kehidupan sosial etnis Tionghoa yang nampak sangat jelas, yaitu seperti adanya pembatasan antara etnis Tionghoa dengan Pribumi. Pembatasan sosial tersebut dapat kita lihat ketika etnis Tionghoa yang hanya ingin bergaul dengan sesamanya saja, begitupun dalam pernikahan bahkan beberapa lembaga pendidikan yang mayoritas siswanya adalah etnis Tionghoa. Salah satu contoh kasus adanya eksklusifitas di kalangan etnis Tionghoa yaitu terdapat di salah satu perguruan tinggi di Bandung yang bernama Universitas Parahyangan (Unpar). Setelah peneliti melakukan pengamatan melalui pertanyaan-pertanyaan ke beberapa mahasiswa Pribumi di sana, mahasiswa tersebut menjawab bahwa masih terdapat eksklusifitas di

kalangan mahasiswa Tionghoa, meskipun tidak terlalu kaku dan sebagian mau bergaul dengan mahasiswa selain Tionghoa. Eksklusifitas tersebut menurut jawaban salah satu mahasiswa dapat dilihat ketika makan di beberapa tempat makan, dimana para mahasiswa Tionghoa hanya berkumpul dan makan bersama mahasiswa-mahasiswi Tionghoa lainnya. Eksklusifitas etnis Tionghoa ini yang menyebabkan adanya sikap sentimental etnis Pribumi lainnya, sehingga dalam sejarahnya etnis Tionghoa di Indonesia sering mengalami konflik rasial atau bahkan konflik dengan istilah “Anti Cina” yang berakar pada zaman Hindia Belanda tepatnya ketika pemerintah Hindia Belanda membagi masyarakat ke dalam tiga golongan rasial (Onghokham, 2017b, Hlm. 13).

Apabila ditinjau secara historis, menurut Widyahartono kedatangan etnis Tionghoa ke Nusantara dimulai pada pertengahan abad ke-6. Pada kala itu terdapat hubungan dagang antara negeri Tiongkok dan kerajaan-kerajaan di Nusantara (Widyahartono, 1988, hlm. 6). Adapun menurut Suryadinata, karena alasan berdagang etnis Tionghoa bermigrasi atau berdiaspora dari negeri asalnya Tiongkok ke Nusantara dan bahkan banyak yang menetap dan berakulturasi dengan masyarakat Pribumi Nusantara (Suryadinata, 1988, hlm. 1-2). Dari penjelasan tersebut, menurut peneliti kedatangan etnis Tionghoa pada awalnya adalah karena ingin melakukan aktivitas perdagangan, dan tidak ada masalah atau gesekan antara etnis Tionghoa dan Pribumi, karena menurut beberapa sumber mengatakan bahwa etnis Tionghoa pada saat itu sudah berakulturasi dengan masyarakat Pribumi. Hal tersebut diperkuat oleh Hidajat (1993) yang mengatakan bahwa :

Secara kenyataan historis telah membuktikan bahwasannya sebelum orang-orang Belanda datang di Indonesia, proses asimilasi telah berlangsung. Data-data historis seperti berita-berita dari Cho Ku Fei, Ibnu Batuta dan lainnya. Hasil dari proses asimilasi ini seperti nampak pada banyak elemen-elemen kebudayaan asing yang dilarutkan dalam kebudayaan Indonesia (Hlm 4).

Dinamika kehidupan masyarakat etnis Tionghoa yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan hal yang membuat peneliti tertarik untuk menelitinya. Etnis Tionghoa pada awal kedatangannya ke

Maulana Ainurrahman , 2018

**ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL-POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA
UNTUK ETNIS TIONGHOA DI JAWA TAHUN 1900-1942**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Indonesia tidak menimbulkan masalah sosial, bahkan sebagian sudah berasimilasi dengan penduduk pribumi. Semenjak berkuasanya pemerintah Hindia Belanda tepatnya ketika diterapkannya sistem *Apartheid* pada tahun 1830 (sumber lain mengatakan tahun 1854) yang menjadi salah satu politik pecah belah (*divide et impera*) Hindia Belanda, etnis Tionghoa mulai memisahkan diri dengan golongan Pribumi (Onghokham, 2017b, Hlm. 3). Memang eksklusifitas etnis Tionghoa pada dasarnya berasal dari internal etnis Tionghoa sendiri, karena sikap mental budaya etnis Tionghoa di Indonesia masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya di negeri Tiongkok dengan pola kehidupan yang didasarkan pada ajaran Confusius, Taoisme dan Budhisme. Meskipun pada akhirnya asimilasi dapat berjalan, namun tidak sempurna karena faktor internal ini didukung oleh sistem pendidikan Belanda yang didirikan ketika masa Hindia-Belanda, dimana kehidupan generasi muda etnis Tionghoa yang mengenyam pendidikan Belanda tersebut cenderung kepada sikap hidup orang Barat bukan ke pribumi (Hidajat, 1993. Hlm 112). Disisi lain, dalam mengurus pendidikan etnis Tionghoa yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda yaitu mendirikan sekolah khusus bagi etnis Tionghoa *Hollandsch Chineesche School* (HCS).

Peneliti menyimpulkan bahwa faktor penyebab sikap eksklusifitas etnis Tionghoa berasal dari internal etnis Tionghoa sendiri, lalu didukung dengan beberapa kebijakan sosial-politik pemerintah Hindia Belanda yang mendukung pemisahan golongan atau etnis di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda antara lain seperti sistem pemisahan golongan masyarakat di Indonesia (*Apartheid*), dan pemisahan pendidikan antara etnis Tionghoa dan Pribumi dengan didirikannya sekolah khusus etnis Tionghoa *Hollandsch Chineesche School* (HCS) (Suryadinata, 1986. Hlm. 26). Kemudian salah satu kebijakan lainnya adalah penetapan wilayah tempat tinggal sesuai etnis dan Golongan tertentu (*Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel*).

Kebijakan-kebijakan sosial-politik pemerintah Hindia Belanda yang telah disebutkan di atas merupakan penyebab adanya kesenjangan sosial antara etnis Tionghoa dan Pribumi di Indonesia di luar konteks perekonomian. Menurut peneliti hal tersebut merupakan suatu keunikan, dimana etnis Tionghoa yang sudah berasimilasi dengan etnis-etnis Pribumi dan menjadi bagian masyarakat Pribumi kemudian menjadi

Maulana Ainurrahman , 2018

**ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL-POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA
UNTUK ETNIS TIONGHOA DI JAWA TAHUN 1900-1942**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

golongan yang terpisah seolah mereka bukan penduduk Pribumi. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan sosial-politik pemerintah Hindia Belanda yang telah disebutkan menjadi masalah yang akan di kaji oleh peneliti. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai kebijakan kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang meliputi masalah-masalah kebijakan dan pola pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Adapun rentang waktu yang diambil oleh peneliti dimulai dari tahun 1900-1942, karena pada tahun tersebut hal-hal yang mencolok mengenai pembatasan etnis Tionghoa menurut peneliti mulai terlihat tepatnya sejak dimulainya politik etis. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Onghokham, bahwa sentimen anti Cina memuncak pada masa diterapkannya politik etis ketika Belanda ingin melindungi penduduk Pribumi terhadap “kelicinan” etnis Tionghoa. Politik etis ini pun menyebabkan adanya gerakan emansipasi atau gerakan Cina-Jawa yang menuntut persamaan hak dengan orang Eropa. Gerakan tersebut adalah gerakan khusus etnis Tionghoa dan hanya mementingkan golongannya saja. Dengan begitu, pada rentang tahun diterapkannya politik etis (1900-1942) terlihat jelas eksklusifitas etnis Tionghoa pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Terlebih lagi tahun tersebut merupakan masa pergerakan nasional, dan menurut Onghokham yang menjadi khas zaman pergerakan pada masa Hindia Belanda adalah tiap golongan rasial hanya bergerak demi golongannya sendiri termasuk etnis Tionghoa (Onghokham, 2017b. Hlm. 13-14).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dipaparkan di atas, maka peneliti memiliki rumusan masalah utama yaitu **“Bagaimana pelaksanaan politik segregasi pemerintah Hindia Belanda untuk etnis Tionghoa di Jawa pada tahun 1900-1942?”** Untuk membatasi penelitian, maka peneliti membagi tiga pertanyaan penelitian diantaranya :

1. Bagaimana kebijakan sosial-politik yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk etnis Tionghoa pada tahun 1900-1942?
2. Bagaimana pola pelaksanaan kebijakan sosial-politik pemerintah Hindia Belanda terkait etnis Tionghoa pada tahun 1900-1942?

Maulana Ainurrahman , 2018

**ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL-POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA
UNTUK ETNIS TIONGHOA DI JAWA TAHUN 1900-1942**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

3. Bagaimana dampak kebijakan-kebijakan sosial-politik pemerintah Hindia Belanda terhadap etnis Tionghoa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok pikiran di atas, tujuan penelitian utama yaitu menjawab dan memecahkan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Oleh karena itu peneliti membuat tiga tujuan penelitian yaitu :

1. Mendeskripsikan kebijakan sosial politik pemerintah Hindia Belanda untuk etnis Tionghoa, meliputi (1) Sistem *Apartheid*. (2) Penetapan wilayah berdasarkan ras atau golongan (*Wijkenstelsel*) dan (*Passenstelsel*). (3) *Hollandsch Chineesche School* (HCS), sekolah modern yang didirikan oleh Belanda khusus untuk etnis Tionghoa dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.
2. Menganalisis pola pemerintah Hindia Belanda dalam menerapkan kebijakan-kebijakan sosial-politik untuk etnis Tionghoa. Meliputi pola pelaksanaan sistem *Apartheid*, pola pelaksanaan sistem *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel*, serta pola pelaksanaan pendidikan *Hollandsch Chineesche School*
3. Mengidentifikasi dampak kebijakan-kebijakan sosial politik pemerintah Hindia Belanda terhadap etnis Tionghoa dalam aspek budaya, politik dan ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan nantinya akan memiliki manfaat bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Bagi peneliti, manfaat penelitian ini tentunya menjadi sebuah karya tulis ilmiah sebagai bentuk pengaplikasian metode penulisan ilmiah serta beberapa teori yang sudah didapatkan dalam perkuliahan di Departemen Pendidikan Sejarah.
2. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi kajian tentang perkembangan etnis Tionghoa di Jawa dalam bidang sosial dan politik pada masa Hindia-Belanda.
3. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai sejarah masa kolonial Belanda, khususnya mengenai peran etnis Tionghoa serta pergerakannya.

Maulana Ainurrahman , 2018

**ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL-POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA
UNTUK ETNIS TIONGHOA DI JAWA TAHUN 1900-1942**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca untuk menanamkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhkan sentimen etnis khususnya terhadap etnis Tionghoa.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur organisasi yang akan dijelaskan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari beberapa bab antara lain :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang berbagai pendapat bersumber pada literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji mengenai pengaruh Kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk etnis Tionghoa di Jawa tahun 1900-1942.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan tentang metode dan teknik penelitian yang digunakan peneliti selama proses penelitian, terutama dalam mencari sumber-sumber yang relevan dengan pokok kajian yang diangkat serta cara pengolahan sumber yang telah dikumpulkan. Metode penelitian ini menggunakan metode historis dengan teknik studi literatur.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, pada bab ini akan dijabarkan hasil analisis dari berbagai sumber mengenai kebijakan sosial-politik pemerintah Hindia Belanda, mulai dari latar belakang diterapkannya kebijakan, langkah-langkah penerapan kebijakan hingga dampak kebijakan terhadap etnis Tionghoa.

Bab V Kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan selama penelitian. Saran dan rekomendasi peneliti tujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

Maulana Ainurrahman , 2018

**ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL-POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA
UNTUK ETNIS TIONGHOA DI JAWA TAHUN 1900-1942**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Maulana Ainurrahman , 2018
ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL-POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA
UNTUK ETNIS TIONGHOA DI JAWA TAHUN 1900-1942
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu